
POLITIK MASYUMI DI MASA DEMOKRASI PARLEMENTER 1950-1959

Tomi Nurdamarsah

Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas Pascasarjana
Universitas Indraprasta PGRI
tomi_nur@gmail.com

Abstract: Research objective: In this thesis I am about the Masyumi party during Parliamentary Democracy, 1950 - 1959. In its work in the government, cabinet and parliament. My research method is: qualitative research approach and writing history. Results of the study: The results of my research resulted in the role of the Masjumi party in parliamentary democracy in 1950-1959. His role in returning to the NKRI, his role in the cabinet, the 1945 general election during the constituent assembly, the PRRI incident, was finally forced to disband by Soekarno, and Masyumi dissolved his own party. The conclusion from the research above can be concluded that the role of the 1950-1959 Masjumi party has made a major contribution to the Islamic movement in Indonesia. Suggestions to lecturers, students, teachers, Muslims so that they can understand the meaning of Islamic and national relations.

Keywords: Masjumi Party in the Period of Palementer Democracy 1950 - 1959

Abstrak: Tujuan penelitian : Dalam tesis ini saya tentang partai Masyumi pada masa Demokrasi Parlementer, 1950 – 1959. Dalam kiprahnya di pemerintahan, kabinet dan parlemen. Metode penelitian saya ini adalah : Penelitian kualitatif pendekatan dan penulisan sejarah. Hasil penelitian : Hasil penelitian saya mengasilkan peranan partai Masyumi dimasa demokrasi parlementer 1950-1959. Perannya dalam kembali ke NKRI, peran dalam kabinet, pemilihan umum 1945 saat sidang konstituante, peristiwa PRRI, akhirnya dipaksa bubar oleh Soekarno, dan **Masyumi membubarkan sendiri partainya**. Kesimpulan dari penelitian di atas bisa disimpulkan peranan partai Masyumi 1950-1959 telah memberikan sumbangan besar dalam pergerakan Islam di Indonesia. Saran kepada pada dosen, mahasiswa, guru, umat Islam supaya bisa memahami arti dari perjuangan Islam dan bangsa.

Kata Kunci : Partai Masyumi Pada Masa Demokrasi Palementer 1950 – 1959

PENDAHULUAN

Pada masa demokrasi parlementer 1950-1959 keadaan Negara, diliputi peranan partai-partai ditingkat nasional peran partai politik sangat dominan sekali. Sistem politik yang dipakai pada masa itu, adalah demokrasi parlementer dengan UUDS 1950 sebagai pedomannya. Peranan partai Masyumi pada masa ini sangat penting apalagi setelah, ketua umum Mayumi Muh. Natsir mengajukan mosi intergeralnya yaitu kembali ke NKRI. (Abdullah Taufik, *Sejarah Umat Islam Indonesia*, Jakarta, MUI).

Masyumi yang didirikan adalah hasil kongres umat Islam di Jogjakarta 11-10 November 1945. Ini adalah sarana penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia. Umat Islam yang diwakili oleh ormas-ormas Islam memandang penting adanya wakil-wakil dalam bidang politik yang nantinya bisa menyalurkan aspirasinya untuk kemajuan umat Islam secara keseluruhannya. Pada masa demokrasi Parlementer sistem keptaian sangatlah dominan sementara Presiden dan Wakil Presiden hanyalah simbol saja.



Masyumi, kelahirannya di latar belakang oleh keadaan umat Islam pada masa itu keadaan umat Islam. Pada awal kemerdekaan, tidak begitu kuat, 7 kata pada Piagam Jakarta dicoret karena mendapat ultimatum dari golongan Kristen, kalau 7 kata tidak dihapus mereka akan memisahkan diri dari NKRI. Keadaan semacam itu yang mengakibatkan umat Islam perlu mengadakan kongres umat Islam. (*Islam dan Masyarakat*, Jakarta, LP3ES). Namun keadaan lain, setelah Soekarno – Hatta terpilih menjadi presiden, kekuatan Islam justru tidak begitu kuat. Hal itu bisa dilihat ketika menyusun cabinet perwakilan umat Islam hanya 1. Awalnya Presiden hanya mengakui 1 partai PNI, yang oleh beberapa kalangan umat Islam ide itu berbau Fasisme, hanya untuk kalangan nasionalisme saja tidak mewakili umat Islam.

Baru pada tanggal 3 November 1945 keluar maklumat No. X dari wakil presiden Muh. Hatta. Setelah itu muncullah partai-partai politik ada PNI, Masyumi, PKI, PSI, dan lain-lain. Maka umat Islam mengadakan kongres pertama di Madrasah Mu'alimin Jogjakarta. Dalam kongres diputuskan berdirinya partai Masyumi sebagai satu-satunya partai politik yang nantinya akan memperjuangkan aspirasi umat Islam Indonesia. Tetapi, pada awal cabinet presidensial umat Islam belum terwakili, baru pada kabinet Syahril I umat Islam melalui Masyumi baru terwakili dapat 3 sampai 5 pos menteri dalam Kabinet.

Tujuan berdirinya Masyumi adalah terlaksananya hukum, aturan Islam dalam masyarakat Indonesia dan Negara menuju ridlo Ilahi. Keadaan semacam itu benar-benar dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh Islam dengan sebaik-baiknya. Apalagi saat itu kita sedang berjuang menghadapi Belanda yang akan kembali lagi menjajah Indonesia. Dimana Masyumi, turut aktif dalam perjuangan merebut kemerdekaan, baik perjuangan yang dilakukan secara fisik atau dengan perjuangan melalui meja perundingan baik di Linggarjati, Renvil, Rum Royen dimana Muh. Rum adalah tokoh Masyumi yang berhasil dalam perundingan tersebut. Sehingga Soekarno Hatta dapat kembali lagi ke Jogjakarta. Dampak dari Mr. Syafrudin Prawira Negara punya jasa dalam perjuangan menegakkan kedaulatan di Indonesia.

Metodologi sejarah dengan beberapa tahapan antara lain heuristic, kritik sumber, hermeneutic, dan histografi.

Berikut ini adalah tahapan-tahapannya :

1. Heuristik

Tahap ini (pengumpulan sumber) dalam tahap ini penulis mengumpulkan data atau sumber-sumber sejarah yang relevan baik tertulis maupun tidak tertulis. Untuk menentukan materi kelayakan penulis mengumpulkan sumber-sumber data tentang Masyumi.

2. Kritik Sumber

Tahap kritik ini (kritik sejarah/keabsahan sumber sejarah),. Setelah data terkumpulkan secara rangkap dan dapat dipercaya, penulis melakukan tahap seleksi sumber atau koreksi sumber yang mangacu kepada penelitian langkah ini dilakukan secara intrinsik dan ekstrinsik terhadap data. Kritik intrinsik yaitu penelitian memperhatikan keaslian atau autentisitas keberadaan sumber historis tersebut. Sedangkan kritik ekstrinsik dalah penelitian isi sumebr sejarah itu palsu atau asli sesuai dengan peristiwa yang terjadi.

Pada tahap ini peneliti mengkaji data-data yang telah diperoleh lalu dilakukan suatu kritik sumber materi berupa kritik intern dan ekstra. Kritik intern untuk melihat dan menyelidiki isi dari bahan dan dokumen sejarah, apakah pernyataan yang dibuat merupakan fakta yang historis, apakah isinya dapat dipercaya atau tidak, maka

dengan demikian akan diperoleh fakta yang benar-benar dipercaya.

Kritik ekstra dilakukan untuk menetapkan keaslian data atau oteritas data yaitu dengan menanyakan apakah sumber data atau dokumen itu merupakan sumber asli atau sumber palsu atau dapat juga dengan membandingkan dari berbagai macam sumber penelitian, sehingga dapat terlihat keasliannya.

3. Hemaneutika

Tahap ini (interpretasian lisan dan sintesis) hemeneutika merupakan suatu langkah menganalisis atau penulis data dari sumber-sumber serta fakta yang telah terkumpul intinya langkah ini yaitu menafsirkan sumber sejarah benar terdapat sasaran tidak menyimpang dari pola metode kualitatif dan pada masa perodesasi yang berlaku dalam peristiwa itu.

4. Historiografi

Tahap ini (penulisan kembali hasil penelitian sejarah). Pada tahap ini adalah media mengkomunikasikan atau mengungkapkan serta mempertanggung jawabkan hasil yang berarti berbagai tahap penulisan.

Berbagai sumber yang telah dikritik, di interpretasikan dan disertai penganalisaan disajikan dalam bentuk cerita sejarah yang berupa proses historiografi atau penulisan sejarah partai Islam dalam perannya di bidang politik di partai Masyumi. Sehingga nantinya menjadi suatu kisah penting sejarah yang berbicara apa adanya, dengan terstruktur serta dapat di pertanggung jawabkan. (WR Hendra Saputra, *Metode Penelitian Sejarah*, UHAMKA Press, hal. 10)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, UUD (Undang- undang Dasar) dengan UUD sementara 1950 yang berbentuk system parlementer. Semua peranan dimainkan oleh partai politik kekuasaan Negara. Kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri, Presiden dan Wakil Presiden hanya sebagai symbol saja. Untuk membentuk kabinet presiden menunjuk Moh. Natsir, sebagai perdana menteri karena berjasa atas mosi Integrasinya. Oleh karena perimbangan kekuatan partai Masyumi di parlemen dimungkinkan untuk membentuk kabinet dengan menawarkan kepada partai lain untuk berkoalisi dengan partai lain, yaitu PNI, kesepakatan antara Masyumi dan PNI tidak dapat tercapai, karena posisi yang diminta PNI sangat besar yaitu menteri pendidikan, menteri dalam negeri. Keduanya sangat strategis, akhirnya Mosi Natsir membentuk kabinet tanpa PNI, PNI dalam kabinet Natsir sebagai oposisi. Jumlah menteri 18 anggota itu, partai Masyumi 4 kursi, sedangkan sisanya dibagi PSI, non partai, Katolik, Parkindo.

Kabinet Ali jatuh Hatta menunjuk tiga orang formatur Sukiman (Masyumi), Wilopo (PNI), Assaat (non partai). Hatta berpesan hendaknya kabinet yang akan dibentuk dari orang-orang jujur memulihkan kewibawaan pemerintah, khususnya ABRI dan masyarakat yang menyelenggarakan pemilu yang jujur, agar parlemen baru dapat dibentuk.

Formatur kabinet kandas ketika menghadapi masalah siapa yang akan menjadi perdana Menteri. Karena tidak ada kerja sama maka Masyumi dan PNI kabinet kandas. Hatta menunjuk Mr. Burhanuddin Harahap dari Masyumi untuk bentuk kabinet. Burhanudin Harahap awalnya memilih partner kabinet PNI partai terbesar kedua. Lagi-lagi Burhanuddin Harahap mendapat tantangan dari PNI calon yang diajukan justru



bermasalah yaitu : Mr. Hardi punya masalah dengan umat Islam. Penghinaan terhadap Al-Qur'an dan Nabi Muhammad, berat rasanya memakai beliau akhirnya Burhanudin minta calon lain yang bisa bekerja sama dengan Masyumi tapi PNI tidak mau.¹⁵ (Moh. Natsir, *Pemikiran dan Dakwah*, hal 4-10)

Akhirnya, dengan mempertimbangkan dengan masak-masak Burhanudin Harahap mengumumkan kabinet tanpa PNI. Otomatis PNI sebagai Oposisi. Kabinet terdiri dari Masyumi berkoalisi dengan Partai-partai NU, PSI, PRN, dan lain-lain.

Program kerja sama

1. Mengembalikan kewibawaan Angkatan Darat
2. Tugas utama melaksanakan Pemilihan Umum
3. Perbaiki ekonomi

Pemilihan Umum pertama di Indonesia 1955 dilaksanakan dengan jujur dan adil. Pemilihan umum dilaksanakan dua tahap, Tahap satu untuk memilih anggota DPR 29 September 1955, tahap kedua untuk memilih anggota konstitusi 15 Desember 1955, yang menarik dari pemilihan umum ini semua kontestan duduk dalam panitia pemilihan mulai dari tingkat pusat sampai PPD, PPS bahkan sampai ke KPPS. Pemilihan umum pertama diikuti oleh pemerintah dan Parpol.

Yang menarik dalam kampanye Pemilu 1955 parpol yang berkampanye walaupun satu lapangan bola tidak saling bentrok, padahal pertarungan ideologi antar Islami dan sekuler, komunis dan lain-lainnya kuat. Berbeda dengan pemilu berikutnya 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1999, 2004 di pemilihan ini rawan konflik. Padahal di masa Orde Baru azaz parpol sama.

Masing-masing Parpol cenderung kedaerahan, Masyumi didukung oleh kaum Islam modernis. anak-anak muda muslim banyak di daerah Sumatera, Aceh, Jawa Barat, Jakarta, Kalimantan, Sulawesi sebagian Maluku hampir semua daerah.

Berbeda dengan PNI hanya menang di Jawa Tengah, Bali. PKI Jawa Tengah, sebagian Jawa Timur, NU Jawa Timur, Kalimantan Barat.

Hasil Pemilu 1955 untuk DPR

1. PNI	: 57 kursi
2. Masyumi	: 57 kursi
3. NU	: 45 kursi
4. PKI	: 39 kursi
5. PSII	: 8 kursi
6. Parkindo	: 8 kursi
7. Partai Katolik	: 8 kurs
8. PSI	: 6 kursi
9. Perti	: 6 kursi
10. IPKI	: 4 kursi

11. Murba	: 2 kursi
12. PRI	: 2 kursi
13. PIR Wongso	: 1 kursi
14. PIR Hazairin	: 1 kursi

Sisanya tidak dapat kursi.

Dari hasil di atas tampaklah bahwa sebelum pemilihan umum banyak menguasai legislatif. Setelah pemilu banyak menjadi partai Gurem. PSI Sultan Syahril sebelum pemilu 15 kursi dalam DPR, setelah pemilu hanya 5 kursi, apalagi PIR Hazairin sebelum pemilu 19 kursi setelah pemilu hanya 1 kursi. Ada juga yang kursinya baik, NU setelah keluar dari Masyumi hanya 8 kursi melonjak menjadi 45 kursi.¹⁶ (*Kenangan 10 Revolusi Depen*, hal 322.)

Masyumi dan PNI tetap sebagai partai terbesar, jumlah kursi sama 57 kursi. Menurut Deliar Noor kekuatan Masyumi sebelum NU keluar lebih sampai 50 kursi. Kalau saja NU tidak keluar Masyumi akan tampil sebagai pemenang. Sangat disayangkan pada pemilu pertama ini. Partai Islam terbagi menjadi Masyumi 57 kursi, NU 45 kursi, PSII 8 kursi Perti 5 kursi PPTI 1 kursi. kalau digabungkan hanya 58%, akan terbukti di sidang-sidang konstituante.

Majlis Konstituante hasil pemilu 1955 di Bandung tugas Majlis ini adalah merumuskan Undang-Undang Dasar. Ketika sidang-sidang konstituante mulai, tak ada rancangan Undang-Undang Dasar, karena tak ada yang utuh. Sidang konstituante berjalan berjalan berlarut-larut. Selama masa dua tahun fundamental tersebut hampir semua alot.

Pertentangan kuat di sidang konstituante cukup panjang, dasar Negara ada yang menginginkan Islam, Pancasila, Komunis. Masyumi menginginkan Islam sebagai dasar Negara.

Islam didukung oleh 230 anggota Masyumi, 112 NU, 91 PSII, 16 Perti, 7 pecahan Masyumi. Di sidang konstituante sangat penting. Dalam pidatonya Moh. Natsir 12 November 1957, bahwa hasil dari sidang ini akan dipertanggung jawabkan kepada rakyat dan generasi mendatang, karena kita harus memuat pendirian sejelas-jelasnya. Toleransi yang dimaksud adalah untuk membuka ruang dan suasana seluas-luasnya bagi konfrontasi ide-ide dan pemikiran.

Karena itu Moh. Natsir, konstituante harus bebas dari tekanan dan saling terbuka dalam menyampaikan gagasan masing-masing. Masyumi jelas dari awal Islam sebagai dasar Negara, kemudian mengajukan usul itu selalu terbuka, bukan karena semata-mata umat Islam adalah golongan terbanyak di kalangan rakyat. Kami ingin memajukan Islam sebagai dasar Negara kita. Tetapi dalam pandangan Masyumi ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan masyarakat serta dapat menjamin hidup keberagaman dan saling menghargai dalam bahasa Moch Natsir menggambarkan keinginan umat kalaupun besar tidak melanda kalaupun tinggi malah melindungi.

Dalam pidato itu Moch. Natsir juga mengeritik Pancasila sebagai gagasan yang bersumber dari hasil penggalian manusia yang tidak bersumber pada agama. Kalaupun saja sila ketuhanan sumbernya adalah sekuler laa diniyyah, tanpa agama, tegasnya bagi umat Islam ujar Natsir, menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, ibarat melompat dari bumi tempat berpijak ke ruang hampa vakuum tak berhawa. Itu disebabkan karena Pancasila ingin menjadi ideologi yang berdiri sendiri, yang netral dari agama dan berada



di atas segala-galanya. Natsir menyatakan dasar Negara haruslah sesuatu yang sudah mengakar di masyarakat dan realitas sejarah membuktikan bahwa Islam sebagai agama yang dianut mayoritas rakyat Indonesia cukup mengakar di masyarakat dan mempunyai sumber yang jelas, yaitu wahyu tidak seperti Pancasila yang mempunyai sumber yang tidak jelas, yang berasal dari tafsiran filosofis seseorang.¹⁸ (Tolchah Mansyur, *Ibid*, hal. 259)

Dalam sidang konstituante pandangan Masyumi jelas tetap menjadikan Islam sebagai forum yang penuh toleransi dan demokrasi hingga dia akan tegas-tegas menyatakan pendiriannya soal dasar Negara.

Buya Hamka yang juga anggota Masyumi mengatakan bahwa Pancasila dikenal oleh beberapa orang saja, sedangkan sebagian besar penduduk Indonesia menganut dari asli Islam, Islam adalah dasar yang asli di tanah air kita dan pribadi sejati bangsa Indonesia. Pancasila tidak mempunyai dasar sejarah di Indonesia. Hamka berpendapat perjuangan para pendahulu di abad 19 mewujudkan Islam dan dilakukan para ulama.

Dalam sidang konstituante 19 November 1957 semua tokoh Masyumi, baik Hamka, Moch. Natsir, tetap Islam sebagai dasar Negara. Dalam hal ini juga diperkuat oleh anggota konstituante yang lain khususnya dari Nahdlatul Ulama (NU) KM. Ahmad Zaini dia meragukan Pancasila. Bahkan tidak memiliki acuan yang kongkrit, menurut Zaini semboyan-semboyan dalam Pancasila sulit dibuktikan dalam kehidupan bangsa.

Selain Zaini tokoh NU, KH. Masykur dan Syafrudin Zuhri juga meragukan Pancasila sebagai formula yang kosong tanpa arah. Pancasila akan menjadi perwujudan orang yang mengisinya, walaupun ada Ketuhanan Yang Maha Esa tapi bisa diisi oleh Tuhan - Tuhan lain baik dari Nasrani, Yahudi atau penyembah Pohon sekalipun, tegas KH. Maskur. Menurut Zuhri Pancasila mempunyai kekurangan-kekurangan disebabkan tiadanya kebulatan berfikir Pancasila sulit untuk bisa diklaim sebagai falsafah dan dasar Negara posisinya, paling tinggi sebagai persetujuan politik bagi aliran-aliran ideologi yang ada.

Jelas di masa-masa sidang-sidang konstituante Islam sebagai dasar Negara tidak hanya diperjuangkan oleh Masyumi tetapi oleh partai Islam lainnya. NU, PSII, Perti dan PPTI dan semuanya ditentang oleh golongan nasionalis sekuler, PNI, PKI, Murba, Katolik, Parkindo. Sidang konstituante banyak dihianati oleh orang-orang sekuler, Kristen, Komunis dan akan berlanjut dikemudian hari.

Ketegangan juga berlangsung di luar gedung konstituante, Bung Karno selaku presiden mulai melakukan konsepsi presiden yang dibacakan di lapangan Banteng 1956 yang akan membentuk kabinet kaki empat, mengurangi partai, melaksanakan demokrasi terpimpinnya. Kabinet terakhir Ali II tidak bisa berbuat banyak yang akhirnya menyerahkan mandatnya di akhir 1956 Moh. Hatta selaku wakil presiden mundur. Ketegangan makin luas, terutama daerah yang menyebabkan anti Jakarta.¹⁹ (*30 Tahun Indonesia Merdeka*, Jilid 2, Deppen, hal. 99)

Presiden, mulai melaksanakan konsepsinya dengan membentuk kabinet karya dengan Juanda sebagai menteri pertama, diwakili oleh Idham Kholid (NU) Dr. Leimena (Kristen), Mr. Ha.di (PNI). Sejak itu Masyumi sudah tidak lagi berperan di kabinet.

Umat Islam melihat Soekarno sudah tidak terus memaksakan kehendak konsepsinya untuk melangsungkan kekuasaannya menjadi pemimpin yang sangat otoriter dan meletakkan demokrasi menurut kehendaknya. Masyumi, NU, PSI, Parkindo menolak tegas, sementara PNI, PKI, mendukung dengan gigih dan melakukan intimidasi dimana-mana. Konsepsi itu terus mendapat protes keras pada tanggal 27 Februari 1957, mereka

menolak konsepsi di Istana Merdeka, langsung dihadapan Presiden Soekarno, dan menolak berkembangnya Paham PKI di Kabinet.

Tidak adanya kekuatan mayoritas dari hasil pemilu 1955 baik di parlemen ataupun konstituante membuat sidang yang berlangsung selama 3 tahun tidak ada yang berhasil meraih dua pertiga suara peserta. Pertentangan pendapat Majelis Konstituante agaknya tak mungkin lagi ditemukan titik temunya, karena pendukung kelompok Islam dalam majlis tidak lebih dari 44%. Kelompok Pancasila 56 % juga tidak bakal berhasil mencapai forum. Pemerintah menganggap bahwa dalam keadaan demikian, Majelis Konstituante telah mengalami kegagalan. Jalan keluarnya kembali ke Undang- Undang dasar 1945. Sebab sejak tahun 1957 presiden Soekarno telah merumuskan konsepsinya untuk demokrasi terpimpin, Undang-Undang Dasar 1945. kemudian pada 2 Juni 1959 majlis mengadakan pemungutan suara dalam rangka kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dengan Piagam Jakarta yang dimasukkannya 7 kata kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya pada pasal 29, pemungutan suara dimulai 210 setuju dan 265 tidak setuju.²⁰ (Al-Chaidar, *Reformasi Prematur*, Jakarta, hal. 110)

Karena tidak menghasilkan mayoritas mutlak maka presiden melakukan langkah draktis mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 di Istana Merdeka, Dekrit Presiden mendapat dukungan dari PNI, PKI, IPKI setelah pemungutan suara 2 Juni. Ketiga partai tersebut tidak hadir dan memboikot sidang-sidang selanjutnya dengan demikian konstituante tidak mungkin lagi melakukan tugas-tugasnya. Dekrit yang dikeluarkan Presiden Soekarno menimbulkan banyak penafsiran dari kalangan pengamat. Adnan Buyung Nasution menyatakan dekrit tersebut merupakan bagian dari Soekarno intervensi terhadap Konstituante Majelis Konstituante bukannya gagal tetapi digagalkan padahal konstituante adalah pilihan rakyat, benar-benar mewakili rakyat secara keseluruhan karena itu dekrit adalah tindakan diktator presiden.

Anwar Haryono yang merupakan anggota konstituante dari Masyumi mengatakan membantah bahwa konstituante gagal menjalankan tugasnya menurut beliau konstituante tidak akan gagal kalau tidak diboikot oleh kalangan PNI, murba, PKI, parkindo katolik, dan partai nasionalis lainnya. Meski menurut. Suwiryo ketua PNI dan Prawoto ketua Masyumi ada saling melelukan pendekatan, Masyumi menginginkan Undang-Undang Dasar memakai Piagam Jakarta, yang merupakan bagian dari konstitusi kita. Tapi belum lagi hal itu terwujud Soekarno sudah mengeluarkan dekritnya. Masyumi sikapnya tegas tidak mempersoalkan isi dekrit itu namun Masyumi mempersoalkan cara dikeluarkannya dekrit itu, yang mengedepankan kekuasaan tidak dengan cara cara musyawarah. Masyumi menduga dekrit itu di keluarkan yang memuluskan hasrat politik Soekarno untuk lebih leluasa menerapkan demokrasi terpimpinnya, sedangkan jika konstantuasi berhasil melakukan kompromi maka demokrasi akan tegak. Menurut Mohammad Natsir kalau konsepsi itu jadi kenyataan maka yang tumbuh adalah diktator perseorangan.

Ketua konstituante berpendapat bahwa 90% tugas konstituante sudah selesai tinggal dasar Negara, menurut Endang Saifudin mengatakan bahwa Piagam Jakarta yang disebut dalam dekrit 5 juli 1959 adalah kembalinya dalam rangka persatuan dan perjuangan nasional karena itu posisi Piagam Jakarta senafas dengan konstituasi 1945. Akhirnya presiden Soekarno benar-benar mengeluarkan dekritnya 5 juli 1959 yang isinya

1. Pembubaran Majelis kontituante
2. Berlakunya UUD 1945
3. Tidak berlakunya UUDS 1950



Dengan demikian keluarnya Dekrit Presiden Masyumi tegas menolaknya karena penyampaian cenderung dengan kekuasaan, dan tentara lebih leluasa untuk menerapkan system militernya di pemerintahan. Kekuatan Islam yang diwaktu konstituante bersatu setelah Dekrit terpecah, NU, PSII dan Perti mengikuti arus pemerintah.²¹ (Rusdi Hamka, *Pribadi dan Martabat Buya Hamka*, Jakarta, Panji Masyarakat 1982, hal. 103-115)

Masyumi melakukan oposisi dan membentuk liga demokrasi dengan tujuan mempertahankan dan menegakan demokrasi, liga itu memperoleh kemajuan pesat tetapi dengan cepat pemerintah membubarkannya.

SIMPULAN

Setelah kongres Umat Islam sangat memuaskan dan mengagumkan. Di dalam riwayat kongres kaum muslimin Indonesia belum pernah terjadi, dapat berkumpul segenap ulama, pemimpin-pemimpin Islam, kepala-kepala pondok dan madrasah bermusyawarah dalam suasana menggelora tetapi tenang dan tenteram. Demikianlah muktamar yang selama berlangsung penuh dengan keakraban, keputusan muktamar umat Islam berhasil dengan hasil :

1. Mendirikan satu partai politik Umat Islam yang menamakan Masyumi.
2. Masyumi satu-satunya paratai politik Islam dan tidak boleh ada partai lain.
3. Masyumilah yang akan memperjuangkan nasib umat Islam di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Taufik, *Sejarah Umat Islam Indonesia*, Jakarta, MUI.
..... *Islam dan Masyarakat*, Jakarta, LP3ES
Al-Cahidir. (1998) *Memilih Partai Islam*. Gema Insan Press..
Artawijaya, (2007) *Dilema Mayoritas*. Jakarta Medina, edisi pertama.
Arifin MT (1990) *Muhammadiyah Potret Yang Sedang Berubah*, Surakarta, Institut Gelanggang.,
Anwar Rosihan. (1995). *21 Agustus Beartris*, Republika,
Bajasut SU. *Alam Pikiran dan Jejak Perjuangan Prawoto Angkusasmito*. Surabaya Documenta 1972).
Saefulloh, *Masyumi dan Muhammadiyah*, Gema Insani.
PP Muhammadiyah, *Putusan Tanwir 1955*
Hasan Basri. (1959), *Putusan Mukhtamar Masyumi* MUI
WR Hendra Saputra, *Metode Penelitian Sejarah*, UHAMKA Press
Suswandari, *Metode Penelitian Historiografi*, UHAMKA Press
Taufik Abdullah *Islam dan Bermasyarakat*, Jakarta.
Kementerian Penerangan RI, hal. 36-37
Moh. Natsir, *Pemikiran dan Dakwah*.
Kenangan 10 Revolusi Depen
Tolchah Mansyur, Dr. SH, *Desertasi*
Tolchah Mansyur, *Ibid*
30 Tahun Indonesia Merdeka, Jilid 2, Deppen.
Al-Chaidar, *Reformasi Prematur*, Jakarta